

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Perkembangan teknologi AI dalam ranah jurnalisme telah menjadi perhatian utama, khususnya yang menimbulkan berbagai tantangan, terutama di bidang etika, profesionalisme, dan kekosongan regulasi. Beragam penelitian sebelumnya telah mengkaji soal AI yang diterapkan dalam ruang redaksi, termasuk implikasinya terhadap praktik dan peran jurnalis. Oleh karena itu, bagian ini akan membahas dan menganalisis relevansi kajian-kajian terdahulu tersebut dalam fokus pada dinamika regulasi penerapan AI dalam praktik jurnalistik di Indonesia.

Tabel 2.1 Analisis Literatur

Peneliti	Temuan Utama	Perspektif yang Diambil	Relevansi dengan Penelitian Ini
de-Lima-Santos & Ceron (2022)	Penerapan AI dalam industri media secara global, pengaruh teknologi AI terhadap proses pemberitaan.	Fokus pada <i>machine learning</i> , NLP, dan <i>computer vision</i> dalam AI	Menjadi dasar pemahaman tentang adopsi AI dalam ruang redaksi. Fokus pada penerapan teknologi.
Lewis et al. (2019)	Bias algoritma dalam jurnalisme berbasis AI, tantangan etika terkait AI.	Kritik terhadap bias algoritma dan etika jurnalisme berbasis AI	Relevan untuk menganalisis tantangan etika dalam penerapan AI di ruang redaksi.
Bossio et al. (2022)	Regulasi NMBC di Australia terkait ketidakseimbangan kekuasaan media dan platform digital besar	Transparansi dan akuntabilitas dalam pemberitaan digital	Relevan dalam diskusi tentang regulasi untuk menyeimbangkan kekuasaan di media dan platform digital.
Ali & Hassoun (2019)	Dampak otomatisasi AI terhadap praktik jurnalisme	Otomatisasi dan isu etika dalam jurnalisme profesional	Konsep etika & profesionalisme
Lynch (2022)	<i>Epistemologi glitch</i> : AI dapat memperkuat bias informasi yang ada.	Kritik terhadap bias manusia dalam teknologi AI	Menjadi dasar untuk mengkritisi bias dalam pemberitaan berbasis AI dan pentingnya regulasi

				untuk mengatasi hal tersebut.
Johansah et al. (2024)	Kompetensi baru jurnalis di era AI, seperti analisis data dan pengelolaan media sosial.	Pengembangan keterampilan jurnalis untuk menghadapi disrupsi AI	Relevan untuk memahami kebutuhan kompetensi jurnalis dalam adopsi teknologi AI.	
Sun et al. (2024)	Persepsi publik terhadap AI dalam jurnalisme, kekhawatiran terkait privasi dan dampaknya terhadap penulisan berita.	Persepsi publik dan dampak privasi dalam jurnalisme berbasis AI	Memberikan dasar untuk regulasi yang mempertimbangkan pandangan publik di Indonesia.	
Dewi Hastjarjo (2024)	& Persepsi jurnalis terhadap AI, peran AI dalam meningkatkan efisiensi, namun pentingnya kontrol manusia.	Pandangan jurnalis tentang AI dan pentingnya kontrol manusia dalam kode etik	Menguatkan pentingnya kontrol manusia dalam penerapan kode etik jurnalistik di era AI.	
de-Lima-Santos et al. (2024)	Analisis pedoman AI di 17 negara, fokus pada transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan privasi.	Isomorfisme institusional dalam regulasi AI di ruang redaksi	Relevansi dengan studi regulasi AI di Indonesia, khususnya pada perusahaan media seperti KG Media dan IDN Times.	
Apriliyanti et al. (2024)	Tantangan AI dalam jurnalisme Indonesia: keterampilan teknologi yang rendah dan biaya tinggi.	Fokus pada tantangan dan etika penerapan AI dalam jurnalisme di Indonesia	Memberikan dasar untuk pengembangan regulasi yang menyoroti tantangan di Indonesia.	

Sebelum membahas dinamika regulasi teknologi AI dalam konteks jurnalisme, kajian awal umumnya menjawab tentang bagaimana teknologi AI diadopsi dan diterapkan dalam praktik jurnalistik. Kajian tentang penerapan teknologi AI dalam jurnalisme, umumnya diteliti untuk mengeksplorasi peluang dan tantangan yang muncul dari penggunaan teknologi ini. Penelitian oleh de-Lima-Santos & Ceron (2022) memberikan wawasan komprehensif tentang penerapan AI di industri berita secara global, khususnya di Amerika dan Eropa. Melalui analisis 102 studi kasus dari proyek JournalismAI, penelitian ini menunjukkan bahwa AI melalui teknologi seperti *machine learning*, *natural language processing* (NLP),

dan *computer vision*, telah mempercepat proses pemberitaan. Namun, penelitian ini juga memberikan hasil terhadap beberapa keterbatasan. Dalam konteks ini, keterbatasan mengenai kurangnya keahlian jurnalis dalam memahami teknologi AI yang menjadi hambatan utama dalam penerapannya secara efektif.

Hal ini juga sejalan pada lingkup lokal terkait perlunya pengembangan kompetensi kemampuan jurnalis dalam mengembangkan teknologi AI ini. Johansah et al. (2024), khususnya jurnalis di media daring Jabar.viva.co.id menghadapi istilah ‘disrupsi AI’. Studi ini menemukan bahwa jurnalis perlu mengembangkan kompetensi baru seperti analisis data dan pengelolaan media sosial untuk tetap relevan di era AI. Dalam hal ini, pengembangan keterampilan profesional jurnalis diperlukan agar dapat mengimbangi tantangan teknologi yang terus berkembang. Pada akhirnya hal tersebut menjadi relevan terhadap landasan krusial dalam perumusan regulasi penggunaan AI di bidang jurnalisme.

Perumusan regulasi penerapan AI di ruang redaksi diperlukan karena AI yang makin berkembang pesat. Ditambah lagi, perkembangan AI di bidang jurnalisme memiliki sejumlah tantangan etika dan profesionalisme. Lewis et al. (2019) memperluas diskusi dengan fokus potensi bias algoritma pada penerapan AI dalam jurnalisme. Penelitian ini memberikan kritik mendalam terhadap risiko prasangka ataupun bias yang tidak disengaja dan dapat diperkuat oleh algoritma sehingga menimbulkan tantangan etika dalam jurnalisme berbasis AI. Pendekatan lebih kritis soal bias algoritma juga diangkat oleh Lynch (2022) melalui konsep *epistemologi glitch*. Dalam penelitian ini, *glitch* diartikan sebagai kegagalan kecil dalam sistem AI tidak hanya mencerminkan kelemahan teknis, tetapi juga bias manusia yang diperkuat oleh teknologi AI. Perspektif ini memberikan kritik mendalam tentang persepsi AI yang umumnya dikenal sebagai entitasnya yang cerdas, justru dapat memperkuat bias informasi. Hal ini disebabkan oleh AI yang merupakan hasil dari persepsi subjektif, bukan sifat bawaan dari teknologi itu sendiri. Pandangan ini memperkuat pentingnya regulasi untuk mencegah bias yang tidak disengaja dalam pemberitaan berbasis AI.

Penelitian Lewis et al. (2019) juga menemukan bahwa pentingnya regulasi yang dapat mengatasi risiko ini agar tetap sejalan dengan nilai-nilai jurnalistik. Nilai jurnalistik tersebut perlu diintegrasikan ke dalam kode sistem, agar data yang diproses sesuai dengan standar etika. Sebagai contoh, The Washington Post yang mengembangkan sistem ModBot pada 2017 untuk menyaring komentar secara otomatis di situsnya. ModBot membantu mengidentifikasi komentar bermasalah, seperti penggunaan kata kasar sehingga menghemat waktu moderasi komentar yang secara manual. Sistem ini menunjukkan perlunya AI yang etis dan transparan dalam praktik jurnalisme digital. Oleh karena itu, penulisan semacam *disclaimer* diperlukan sebagai bentuk transparansi media terhadap audiens. Penelitian mereka juga menjadi sebuah perspektif yang memperkuat temuan de-Lima-Santos & Ceron (2022) tentang perlunya pelatihan dan pengawasan yang memadai dalam mengintegrasikan AI di ruang redaksi. Dalam hal ini, meskipun keduanya memiliki fokus terhadap aspek yang berbeda, keduanya sejalan dalam menunjukkan bahwa penerapan AI memerlukan perhatian mendalam terhadap aspek teknis dan etis.

Lebih lanjutnya soal etika jurnalisme, Ali & Hassoun (2019) melengkapi diskusi dengan membahas dampak otomatisasi AI terhadap praktik jurnalisme profesional. Walaupun AI memungkinkan produksi berita yang lebih cepat dan efisien, penelitian ini lebih membahas soal isu-isu etis seperti transparansi, akurasi data, dan bias algoritma yang juga menjadi fokus Lewis et al. dan Bossio et al. Namun, kritik yang paling menonjol terhadap penelitian Ali & Hassoun adalah sebagian besar temuan mereka lebih relevan di konteks negara maju. Sementara itu, penerapan teknologi AI di negara berkembang seperti Indonesia masih terbatas dan menghadapi tantangan struktural yang berbeda. Kondisi ini membuka ruang bagi penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi negara berkembang dapat mengadaptasi teknologi AI secara kontekstual, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar jurnalisme. Terlebih lagi, untuk peneliti selanjutnya menelaah dinamika regulasi AI muncul dan berkembang di ruang redaksi negara berkembang. Hal tersebut menjadi celah penting yang ingin dijawab di penelitian ini, dengan fokus

pada bagaimana KG Media dan IDN Times merespons dan mengatur teknologi AI dalam konteks kelembagaan, nilai jurnalistik, serta tekanan eksternal dari platform dan regulasi global.

Kekhawatiran akan etika dan profesionalisme jurnalisme ini juga dialami dari segi publik. Hal ini dapat dilihat melalui temuan dari penelitian Sun et al. (2024) yang berbasis di Tiongkok. Penelitian ini menemukan bahwa walaupun publik menerima dan menunjukkan sikap positif terhadap AI sebagai alat yang bermanfaat, masih terdapat kekhawatiran terkait privasi dan dampaknya terhadap aspek penulisan berita humanisme dalam jurnalisme. Persepsi ini dapat menjadi dasar bagi regulasi di Indonesia yang mempertimbangkan pandangan publik dalam menyusun pengembangan regulasi. Sementara itu, berdasarkan penelitian Dewi & Hastjarjo (2024) yang mengkaji perspektif jurnalis itu sendiri, memandang AI sebagai alat bantu yang dapat meningkatkan efisiensi kerja seperti mempercepat proses pengetikan, pencarian data, dan *editing*. Namun, mereka juga menegaskan bahwa pentingnya kontrol manusia karena AI belum mampu menjamin penerapan kode etik jurnalistik secara utuh (terutama pada Pasal 2, 3, 7, dan 8.). Dengan demikian, baik itu dari sisi publik maupun jurnalis, keduanya menekankan perlunya regulasi yang jelas untuk memastikan penggunaan AI dalam jurnalisme tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan tanggung jawab profesional.

Jika kebutuhan akan regulasi ini dilihat dalam perspektif global, penelitian yang dilakukan oleh Bossio et al. (2022) mengenai News Media Bargaining Code (NMBC) di Australia dapat memberikan kerangka pemahaman yang relevan. Penelitian mereka menunjukkan bahwa regulasi tidak hanya berfungsi sebagai perangkat teknis yang ‘administratif’, tetapi juga sebagai arena politik yang kompleks. Hal ini dapat dilihat ketika berbagai aktor seperti negara, platform digital, dan industri media, terlibat dalam proses negosiasi, pertarungan kepentingan, dan perebutan otoritas. NMBC sendiri lahir sebagai respons negara terhadap disrupsi digital yang menciptakan ketimpangan kekuasaan yang signifikan

antara media konvensional dan perusahaan platform besar seperti Google dan Facebook.

Bossio et al. menjelaskan dalam penelitiannya bahwa regulasi bukan sekadar alat distribusi ulang sumber daya, melainkan regulasi menjadi sebuah strategi intervensi negara untuk menyeimbangkan relasi kekuasaan di ekosistem digital. Dalam hal ini, transparansi, akuntabilitas, dan *public interest* yang diklaim sebagai tujuan etis NMBC, nyatanya berada dalam ketegangan antara retorika ideal dan kompromi politik. Misalnya, Facebook menanggapi NMBC dengan ‘news ban’ sebagai alat tawar untuk menolak kontrol negara. Hal tersebut menjadi contoh konkret dari politik regulasi yang bersifat resistif dan negoasional.

Berbeda dengan Lewis et al. (2019) yang lebih memiliki fokus terhadap implikasi etika algoritma dan bias sistemik dalam penggunaan AI di ruang redaksi, Bossio et al. memaparkan bagaimana regulasi itu sendiri adalah proses politik. Mulai dari siapa yang membuat, siapa yang diatur, dan untuk siapa manfaatnya. Perspektif ini memiliki relevansi dengan penelitian ini, yaitu terkait dinamika regulasi AI di ruang redaksi Indonesia. Perkembangan teknologi AI tidak hanya membawa potensi positif berbentuk inovasi, tetapi juga berisiko menjadi bumerang yang memperdalam disrupsi dalam ekosistem jurnalisme. Dalam konteks ini, disrupsi AI tidak semata-mata berkaitan dengan aspek teknologis. Namun, turut menciptakan lanskap baru dalam tata kelola kekuasaan, seperti: siapa yang berhak menggunakan AI, dalam konteks apa penggunaannya disetujui, dan sejauh mana mekanisme pengawasan penerapan AI dapat dijalankan secara akuntabel.

Terkait proses politik regulasi yang terlihat dalam kasus NMBC, penelitian ini merujuk pada penelitian utama yang dijadikan acuan, yaitu (de-Lima-Santos et al., 2024). Penelitian tersebut menganalisis 37 pedoman AI di sektor media dari 17 negara, dengan meninjau prinsip-prinsip utama seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan privasi dalam penerapan AI di ruang redaksi. Lebih lanjut, studi ini menggunakan kerangka teori isomorfisme institusional dan teori ini juga digunakan

dalam penelitian ini. Relevansi ini untuk memahami organisasi media merespons tekanan eksternal dan menyesuaikan diri terhadap perubahan struktural dan normatif. Dalam konteks Indonesia, teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana KG Media dan IDN Times membentuk regulasi atau inisiatif internal terkait penggunaan AI dalam praktik jurnalisme, apakah didorong oleh tekanan koersif (misalnya, kebijakan pemerintah atau tekanan dari platform lainnya), nilai-nilai profesional (normatif), atau imitasi terhadap praktik media lain (mimetik).

Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih kontekstual terhadap kecenderungan adopsi regulasi AI dalam lingkungan sosial dan budaya yang berbeda, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Selain itu, penelitian mereka juga mengamati pentingnya pengawasan manusia (*human-in-the-loop*), keterbukaan sistem AI, dan perlindungan data pengguna sebagai upaya menjaga nilai-nilai jurnalistik di era digital. Temuan mereka memperlihatkan dominasi negara-negara Barat dalam membentuk standar pedoman AI global yang pada akhirnya menciptakan asimetris kekuasaan antara Global North dan Global South dalam proses adopsi teknologi. Oleh karena itu, relevansi penelitian ini terletak pada dorongannya untuk menggali kebutuhan akan regulasi lokal yang lebih kontekstual, inklusif, dan berakar pada realitas sosial serta budaya yang dihadapi oleh perusahaan pers di Indonesia.

Temuan tersebut diperkuat dengan studi dalam (de-Lima-Santos et al., 2024) yang secara lebih tajam membedah bahwa penerapan AI di ruang redaksi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan persoalan struktural dan normatif yang bersinggungan langsung dengan etika jurnalisme dan politik regulasi. Penelitian mereka menunjukkan bahwa AI generatif membawa potensi disrupsi terhadap rantai produksi berita dan kredibilitas informasi. Disrupsi ini kemudian memunculkan respon kelembagaan berupa pedoman etis, protokol verifikasi, dan mekanisme *top-down* sebagai bentuk penguatan profesionalisme institusional. Dalam kerangka teori isomorfisme institusional, respon-respon tersebut dapat

dilihat sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan koersif, normatif, maupun mimetik, sesuai konteks masing-masing organisasi.

Namun demikian, penelitian mereka juga menemukan adanya kesenjangan antara pedoman normatif dan praktik aktual di lapangan. Sebagian besar organisasi media justru menerapkan pendekatan eksperimental seperti ‘test-and-learn’ dan memberikan ruang bagi eksperimen bawah (*bottom-up*) yang memperlihatkan bahwa realitas praktik sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan dokumen kebijakan formal. Kesenjangan ini membuka celah konseptual yang penting untuk dieksplorasi dalam penelitian ini, terutama terkait alasan munculnya ketidaksesuaian tersebut. Hal ini dapat digali lebih dalam untuk penelitian ini dari segi kendala kapasitas teknis, tekanan bisnis, atau tarik-menarik antara idealisme jurnalistik dan logika ruang redaksi.

Selain itu, aspek struktur organisasi juga dapat ditinjau lebih jauh. Hal ini karena penelitian mereka mencatat bahwa meskipun terdapat konsensus normatif terkait prinsip-prinsip seperti akurasi dan transparansi, cara organisasi media menginstitusikannya sangat bergantung pada struktur otoritas dan kultur kelembagaan masing-masing. Sebagian mengandalkan kontrol ketat secara *top-down* (seperti Volkskrant atau The Guardian). Sementara itu, lainnya membuka ruang eksperimental yang lebih desentralistik. Implikasi ini menjadi relevan bagi konteks KG Media dan IDN Times karena dapat menjadi pintu masuk untuk menelusuri relasi antara redaksi, manajemen, dan pemilik berperan dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi AI secara institusional.

Berbagai penelitian di atas menyinggung soal dinamika kekuasaan global perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Microsoft, dan Amazon memainkan peran dominan dalam pengembangan infrastruktur dan etika AI secara global. Meski demikian, dimensi ini belum cukup terintegrasi ke dalam analisis lokal. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menunjukkan bahwa perusahaan media di Indonesia tidak semata-mata menunggu arahan dari otoritas

eksternal seperti Dewan Pers atau pemerintah, tetapi justru mulai mengambil langkah inisiatif dalam merumuskan pedoman internal terkait penggunaan teknologi AI. Inisiatif ini mencerminkan dinamika regulasi yang bersifat endogen yaitu ketika ruang redaksi, manajemen, dan pemilik media saling berinteraksi dalam membentuk norma, batasan, dan arah kebijakan teknologi AI. Selain itu, melalui berbagai penelitian terdahulu di atas, peneliti akan menggali siapa yang berinisiatif membuat aturan dan bagaimana proses pembuatannya terjadi. Dinamika ini menunjukkan nilai-nilai dan kekuasaan di dalam organisasi media ikut membentuk cara mereka mengatur penggunaan AI di ruang redaksi.

2.2 Kerangka Teori

Penelitian ini bertujuan memahami proses dinamika penggunaan kecerdasan buatan (AI) dibentuk dan dijalankan di ruang redaksi media Indonesia, khususnya di KG Media dan IDN Times. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang proses perumusan, penerapan, serta tantangan yang dihadapi, bab ini menggunakan kerangka teori yang membantu melihat dinamika di balik kebijakan tersebut.

Terdapat tiga teori dan konsep utama digunakan dalam penelitian ini. (1) Isomorfisme institusional, membantu menjelaskan dinamika kompleks tekanan-tekanan koersif, normatif, dan mimetik mendorong media dalam mengadopsi inisiatif regulasi AI. (2) Penerapan AI dalam jurnalisme menjadi konteks teknologisnya, sedangkan (3) Etika dan profesionalisme menjadi pijakan normatif dalam merumuskan dan menilai regulasi yang ada.

2.2.1 Isomorfisme Institusional

Teori institusional awalnya dicetuskan dalam kajian sosiologi organisasi oleh Meyer & Rowan (1977) yang berupaya menjelaskan bagaimana sebuah organisasi membangun, mempertahankan, dan mengubah norma, struktur, serta praktik yang berlaku di lingkungan sosialnya. Menurut temuan mereka, suatu institusi tidak hanya bertindak secara rasional untuk mencapai efisiensi, tetapi juga untuk mendapatkan

legitimasi di mata masyarakat dengan mengadopsi praktik, aturan, ataupun sebuah tradisi. Adopsi ini, baik itu yang bersifat lama seperti hukum dan kebijakan formal, maupun yang baru seperti norma sosial dan praktik terbaik yang berkembang seiring waktu. Proses institusionalisasi ini memastikan bahwa organisasi mematuhi standar yang diakui secara luas sehingga meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik.

Konsep ini kemudian diperkaya oleh DiMaggio & Powell (1983, p. 149) yang mengembangkan teori isomorfisme institusional untuk menjelaskan kecenderungan organisasi dalam suatu bidang, menjadi semakin serupa akibat adanya tekanan baik dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal) organisasi. Temuan mereka mengatakan, legitimasi organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi atau norma sosial, tetapi juga oleh dinamika internal yang mendorong organisasi untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi eksternal, menjaga stabilitas, dan memperkuat status institusionalnya.

Secara khusus, DiMaggio & Powell (1983) mengidentifikasi tiga mekanisme utama perubahan isomorfik, yaitu koersif, normatif, serta mimetik. Ketiganya menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu organisasi dalam suatu lingkungan cenderung mengadopsi pola perilaku atau praktik yang serupa untuk memperoleh legitimasi, kredibilitas, serta keberlangsungan dalam lingkungan sosial dan politik yang terus berubah. Lebih lanjut, (DiMaggio & Powell, 1983, p. 150) dan (Croucher & Woelert, 2018, pp. 2-3) menjabarkan ketiga mekanisme perubahan isomorfik yang memengaruhi proses institusionalisasi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Koersif: Terjadi akibat tekanan eksternal berupa regulasi, kebijakan pemerintah, atau ekspektasi sosial dari pihak yang memiliki otoritas. Organisasi yang bergantung pada entitas dominan seperti pemerintah atau badan regulasi cenderung mengadopsi standar dan

kebijakan dari entitas tersebut untuk menjaga legitimasi, kredibilitas, dan kelangsungan operasional.

- 2) Normatif: Terkait dengan tekanan dari profesionalisme serta norma yang diterima secara luas dalam bidang tertentu. Institusi cenderung mengadopsi praktik yang dianggap etis, profesional, dan sesuai standar industri karena pengaruh dari profesional yang berpendidikan formal serta tergabung dalam asosiasi profesional.
- 3) Mimetik: Mekanisme ini terjadi saat organisasi menghadapi ketidakpastian terkait tujuan atau perubahan lingkungan yang cepat. Dalam kondisi tersebut, organisasi cenderung meniru praktik-praktik yang terbukti berhasil atau yang diterapkan organisasi lain yang dianggap lebih sukses atau mapan untuk mengurangi risiko kegagalan.

Dalam konteks jurnalisme, teori isomorfisme institusional memiliki relevansi dalam menganalisis dinamika regulasi terkait adopsi teknologi AI. de-Lima-Santos et al. (2024) secara khusus menggunakan teori institusional untuk menjelaskan bahwa organisasi media lebih dahulu mengambil inisiatif dalam membuat pedoman AI, dibandingkan dengan institusi regulasi yang formal. Studi mereka menjelaskan, pentingnya peran media dalam mendefinisikan dan mempromosikan pedoman AI secara normatif, sebelum regulasi formal diberlakukan. Hal ini sejalan dengan kondisi ketika inovasi teknologi seperti AI bergerak lebih cepat, dibanding regulasi formal dari pemerintah.

Kondisi ini dapat diproyeksikan ke konteks Indonesia dan tercermin pada kasus KG Media dan IDN Times. Kedua perusahaan pers ini, lebih dulu mengisi kekosongan regulasi dengan cara mengambil langkah dalam membentuk regulasi internal terkait penggunaan AI, ketimbang menunggu regulasi formal dari pemerintah Indonesia ataupun Dewan Pers. Inisiatif ini

dapat dipahami sebagai gabungan dari ketiga mekanisme isomorfisme institusional.

Selain itu, pada proses pembuatan regulasi ini juga tercermin pada politik regulasi dalam mekanisme isomorfisme institusional. Selain sebagai produk hukum, regulasi juga hasil interaksi kekuatan politik, kepentingan ekonomi, dan tekanan sosial. Studi Bossio et al. (2022) terhadap Australia's News Media Bargaining Code (NMBC) memperlihatkan bahwa politik regulasi memiliki signifikansi dalam proses institusionalisasi regulasi media terhadap platform digital. NMBC memperlihatkan proses tekanan politik dan ekonomi dapat memaksa platform digital besar seperti Google dan Facebook untuk menegosiasikan kompensasi bagi media lokal. Hal ini merupakan suatu bentuk isomorfisme koersif yang jelas dalam konteks ekonomi politik regulasi media. Kasus ini menunjukkan bahwa regulasi dapat berfungsi sebagai alat politik untuk mengelola hubungan kekuasaan antara media, platform digital, dan pemerintah.

Tidak hanya itu, tetapi juga (Attard et al., 2023) dalam (de-Lima-Santos et al., 2024) menunjukkan bahwa penerapan AI di ruang redaksi tidak hanya berdimensi teknologis, tetapi juga normatif dan struktural. Konsep *human-in-the-loop* dalam kebijakan internal, banyak organisasi media mencerminkan upaya menjaga batas-batas profesionalisme jurnalistik di tengah inovasi AI. Namun, penelitian mereka juga menemukan adanya jurang antara pedoman normatif dengan praktik nyatanya. Maka dari itu, timbul suatu ketegangan antara idealisme etis dan realitas eksperimental organisasi media. Dinamika ini semakin kompleks karena dipengaruhi oleh struktur kuasa internal organisasi, serta tekanan eksternal dari perusahaan teknologi global dan kondisi pasar. Oleh karena itu, politik regulasi menjadi penting dalam menjelaskan proses suatu media secara aktif menavigasi berbagai tekanan ini, mengintegrasikan prinsip etis, sekaligus menghadapi realitas pasar yang dinamis.

Dengan demikian, melalui teori isomorfisme institusional (mekanisme koersif, normatif, dan mimetik), pemahaman terhadap politik regulasi, serta konsep *human-in-the-loop*, memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk menganalisis dinamika regulasi teknologi AI dalam perusahaan pers di Indonesia, yakni KG Media dan IDN Times. Teori ini membantu memahami proses yang kompleks terhadap suatu perusahaan pers dalam menciptakan regulasi yang adaptif, relevan, serta responsif terhadap kemajuan teknologi AI, bahkan sebelum regulasi formal dari institusi negara hadir.

2.2.2 Penerapan AI dalam Jurnalisme

Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence atau AI) merupakan teknologi yang dirancang untuk meniru dan menjalankan tugas manusia secara otomatis. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan komputer John McCarthy dan Marvin Minsky pada 1956 melalui sebuah workshop di Dartmouth College. Mereka bertujuan mengembangkan mesin yang dapat mensimulasikan kecerdasan manusia. Haenlein & Kaplan (2019, p. 3) menjelaskan AI sebagai kemampuan sistem untuk menginterpretasi data eksternal secara tepat, belajar dari data tersebut, serta memanfaatkan hasil pembelajaran untuk mencapai tujuan spesifik melalui adaptasi yang fleksibel.

Seiring perkembangannya dalam dunia jurnalistik, AI mengalami beberapa fase. Awalnya, munculnya *computational journalism*, yakni pemanfaatan komputer untuk membantu jurnalis mengolah dan menganalisis data skala besar guna meningkatkan kualitas dan kedalaman pelaporan (Lewis & Westlund, 2015, pp. 1-5). Lebih lanjutnya, buku ini mengatakan bahwa *computational journalism* kemudian berevolusi menjadi *data journalism*, yaitu metode jurnalisme yang secara khusus menggunakan algoritma dan teknik statistik untuk mengungkap pola-pola kompleks dari data yang lebih besar (*big data*).

Dalam fase perkembangan berikutnya, muncul beragam konsep otomatisasi dalam jurnalistik seperti *automated journalism* atau *robot journalism* (Lewis et al., 2019; Lewis & Westlund, 2015). Istilah ini mengacu pada penggunaan algoritma untuk memproduksi narasi berita secara otomatis dari kumpulan data, tanpa intervensi langsung jurnalis manusia. Di samping itu, muncul juga *algorithm journalism* yang menitikberatkan pada personalisasi konten berita sesuai preferensi audiens melalui analisis data otomatis (Ali & Hassoun, 2019).

Dalam konteks ilmu komputer, teknologi AI memungkinkan mesin untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan tingkat kecakapan yang setara dengan kemampuan manusia (Rahmat et al., 2025, p. 22). Secara umum, teknologi AI yang sering digunakan mencakup, *machine learning*, *expert systems*, *natural language generation* (NLG), serta *natural language processing* (NLP) (Lewis et al., 2019). Namun, teknologi AI secara luas dapat terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu Traditional AI dan Generative AI (Maurya et al., 2023). Traditional AI memiliki kemampuan yang terbatas yaitu ketika sistem hanya dapat menyelesaikan masalah berdasarkan data yang telah dilatih sebelumnya (*training data*). Contohnya adalah aplikasi *virtual assistant* yang terbatas pada tugas-tugas spesifik. Sebaliknya, Generative AI dirancang lebih fleksibel karena mampu menghasilkan konten baru, tanpa perlu instruksi '*template*' secara khusus. Generative AI lebih interaktif karena mampu belajar, bernalar, serta menyelesaikan persoalan secara lebih adaptif seperti manusia. Implementasi nyata dari Generative AI dalam jurnalistik adalah penggunaan ChatGPT untuk menghasilkan konten berita secara otomatis seperti artikel atau deskripsi produk (Alto, 2023, p. 54).

Penerapan AI dalam ranah jurnalistik mencakup berbagai bentuk dan terminologi yang saling berkaitan, misalnya jurnalisme robot, jurnalisme otomatis, serta jurnalisme algoritma. Seluruhnya mengacu pada

pemanfaatan algoritma AI dalam proses produksi berita yang mencakup pengumpulan informasi, analisis data, hingga penulisan berita secara otomatis (Apriliyanti et al., 2024, pp. 126-127). Sebagai contoh, penelitian mereka mengungkap konsep meta-manusia berupa avatar AI yang digunakan sebagai pembawa berita virtual, menunjukkan kemampuan AI yang menciptakan interaksi menyerupai manusia dan semakin memperkaya potensi penerapannya di ruang redaksi.

Biswal & Kulkarni (2024, pp. 39-42) juga menambahkan bahwa AI memungkinkan otomatisasi tugas jurnalistik yang biasanya memakan banyak waktu, seperti analisis data besar, identifikasi pola preferensi audiens, hingga pembuatan berita berbasis data. AI memiliki peranan yang signifikan dalam jurnalisme data karena kemampuannya mengolah data besar dan kompleks secara efisien untuk menemukan wawasan baru yang sulit dijangkau tanpa teknologi canggih.

Jurnalisme data, sebagai bentuk terbaru dari *computer-assisted reporting*, memperlihatkan metode ilmu sosial yang diterapkan secara optimal melalui bantuan AI dalam praktik jurnalistik (Lewis et al., 2019, pp. 3-4). Di sisi lain, pemanfaatan AI dalam industri media menjadi domain khusus yang membutuhkan kolaborasi erat antara akademisi dan praktisi industri. Whittaker (2019, pp. 105-115) bahkan menyebutkan bahwa AI menjadi kekuatan utama yang mengubah lanskap industri media, dengan kemampuan menghadirkan konten personal melalui analisis otomatis terhadap preferensi audiens. Meski demikian, penggunaan AI dalam produksi berita tetap dihadapkan pada tantangan dalam menjaga integritas dan kualitas informasi.

Secara praktis, penerapan AI dalam jurnalistik mencakup tiga aspek penting (Whittaker, 2019, pp. 118-120), yaitu pengumpulan data otomatis dari berbagai sumber, analisis mendalam terhadap data untuk menemukan

pola audiens yang kompleks, serta distribusi berita secara personal melalui platform digital. Meski AI menawarkan peningkatan efisiensi signifikan dalam proses jurnalistik, aspek etika penggunaan algoritma AI menjadi perhatian yang terus berkembang.

Pemahaman menyeluruh tentang konsep dan terminologi penerapan AI pada jurnalisme ini menjadi dasar bagi peneliti untuk menggali lebih dalam terkait teknologi AI yang diintegrasikan secara nyata di ruang redaksi. Dengan memahami berbagai istilah dan evolusi penerapan AI, peneliti dapat secara lebih teliti mengeksplorasi dinamika serta implikasi penerapan teknologi ini dalam praktik jurnalistik sehari-hari.

2.2.3 Etika dan Profesionalisme Jurnalisme

Dalam era digital yang semakin canggih, konsep etika dan profesionalisme jurnalisme menjadi semakin penting dan berkembang, terutama dengan masuknya AI ke dalam praktik jurnalistik. Etika jurnalisme sebagai panduan moral dan prinsip untuk perilaku jurnalis dan perlu untuk terus beradaptasi agar sesuai dengan konteks perkembangan teknologinya. Seiring dengan penggunaan AI dalam tahapan proses jurnalistik yaitu pengumpulan data, analisis, hingga penyebaran berita, prinsip-prinsip etika ini menjadi semakin kompleks (Biswal & Kulkarni, 2024 pp. 75-78). Profesionalisme jurnalisme yang mengandung aspek akurasi, objektivitas, dan tanggung jawab sosial juga harus diintegrasikan dalam setiap aspek penggunaan AI untuk memastikan kualitas informasi yang dihasilkan tetap terjaga (Whittaker, 2019, pp. 108-110). Namun, menurut Ali & Hassoun (2019) mengenai penerapan AI di ranah jurnalistik, terdapat sejumlah tantangan yang berhubungan dengan etika dan profesionalisme yang dapat dirincikan sebagai berikut:

Etika Jurnalistik

1) *Transparansi*: Transparansi mencakup keterbukaan tentang cara data dikumpulkan dan digunakan, termasuk cara algoritma AI bekerja dalam proses jurnalistik. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan publik dengan memberikan informasi yang jelas tentang data mentah dipilih, diverifikasi, dan digunakan dalam produksi berita. Dalam hal ini, juga termasuk pada pemberitahuan bahwa suatu media menggunakan bantuan AI pada artikelnya.

2) *Fact-checking*: AI memerlukan proses pemeriksaan fakta yang lebih terperinci untuk memastikan bahwa data yang digunakan kredibel, sumber yang dipakai objektif, dan proses pemilihan data dilakukan dengan alasan yang jelas dan transparan.

3) *Fairness*: AI perlu menghindari bias dalam data seperti bias gender atau ras, yang dapat memengaruhi netralitas berita. Prinsip keadilan ini penting untuk melindungi pluralitas dan keragaman perspektif dalam berita yang disajikan

4) *Data Utilization*: Penggunaan data dalam jurnalisme berbasis AI menghadapi tantangan etika karena kurangnya regulasi khusus. Data yang digunakan harus benar, objektif, dan akurat untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah pelanggaran privasi

5) *Data Quality*: Kualitas data juga perlu diperhatikan, terlebih lagi tentang keakuratan dan sumber data yang digunakan oleh AI. Data yang kurang tepat dapat menghasilkan informasi yang menyesatkan.

Profesionalisme Jurnalistik

1) *Undermine Creativity*: Meskipun AI efisien, AI tidak dapat meniru kreativitas manusia seperti menciptakan suasana emosional

atau melakukan wawancara yang mendalam. Kreativitas jurnalis tetap menjadi keunggulan manusia yang tidak dapat digantikan oleh algoritma.

2) *Absence of Monitoring*: AI tidak mampu memahami informasi terbaru. Oleh karena itu, pengawasan manusia tetap diperlukan untuk menjaga kualitas berita.

3) *Bias*: Algoritma pada AI mengikuti pola dari data yang dibuat oleh manusia sehingga dapat menghasilkan berita yang tidak seimbang sehingga penting untuk mengurangi bias yang dapat memengaruhi objektivitas berita yang dihasilkan oleh AI.

Lebih lanjut, penerapan AI dalam jurnalisme, terdapat beberapa unsur di dalamnya yang menjadi acuan penting dalam menjaga standar etika dan profesionalisme. Pertama, transparansi algoritma sebagai bagian dari etika jurnalisme AI. Transparansi algoritma AI menjelaskan pada keterbukaan dalam cara AI bekerja dalam proses pengerjaan jurnalistik. Hal ini juga berhubungan dengan penjelasan tentang cara AI mengumpulkan, menganalisis data, dan menghasilkan berita. Transparansi ini bertujuan untuk menghindari miskomunikasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap media (Surya Mahendra et al., 2024, pp. 210-214). Namun, tantangan transparansi ini menjadi semakin kompleks dalam aplikasi praktis seperti mengungkap sejauh mana teknologi AI digunakan dalam proses jurnalistik dan memastikan bahwa penggunaan algoritma tetap sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan kepercayaan publik (Porlezza & Schapals, 2024, pp. 359-360).

Kedua, akuntabilitas jurnalis juga menjadi prioritas dalam membuat pemberitaan karena wartawan memiliki tanggung jawab untuk memverifikasi hasil yang dihasilkan oleh AI dan memastikan berita yang dipublikasikan tetap sesuai dengan standar profesionalisme jurnalistik

(Biswal & Kulkarni, 2024, pp. 80-83). Akuntabilitas jurnalis juga penting, mengingat algoritma sering kali beroperasi sebagai '*black boxes*' yang sulit dipahami sehingga memerlukan mekanisme pengawasan editorial untuk mencegah kesalahan atau bias dalam berita yang dihasilkan (Porlezza & Schapals, 2024, pp. 359-360).

Selain itu yang ketiga, menghindari bias algoritma adalah tantangan lain dalam etika jurnalisme AI. Bias informasi dari algoritma AI dapat terjadi karena data yang kurang objektif sehingga berita cenderung mengarah pada satu pandangan saja (Reporter Without Borders, 2023). Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa AI diprogram dengan memperhatikan prinsip netralitas dan objektivitas agar informasi yang disajikan tetap seimbang dan akurat (Lewis & Westlund, 2015, pp. 12-15).

Keempat, integritas informasi yang mengacu pada ketepatan dan relevansi data yang digunakan oleh AI dalam menghasilkan berita, serta memastikan bahwa informasi yang disajikan dapat diandalkan oleh publik. AI dapat mempercepat proses analisis data, tetapi tetap membutuhkan pengawasan manusia untuk menghindari kesalahan dan memastikan bahwa berita yang diproduksi tetap kredibel dan tidak bias (Reporter Without Borders, 2023).

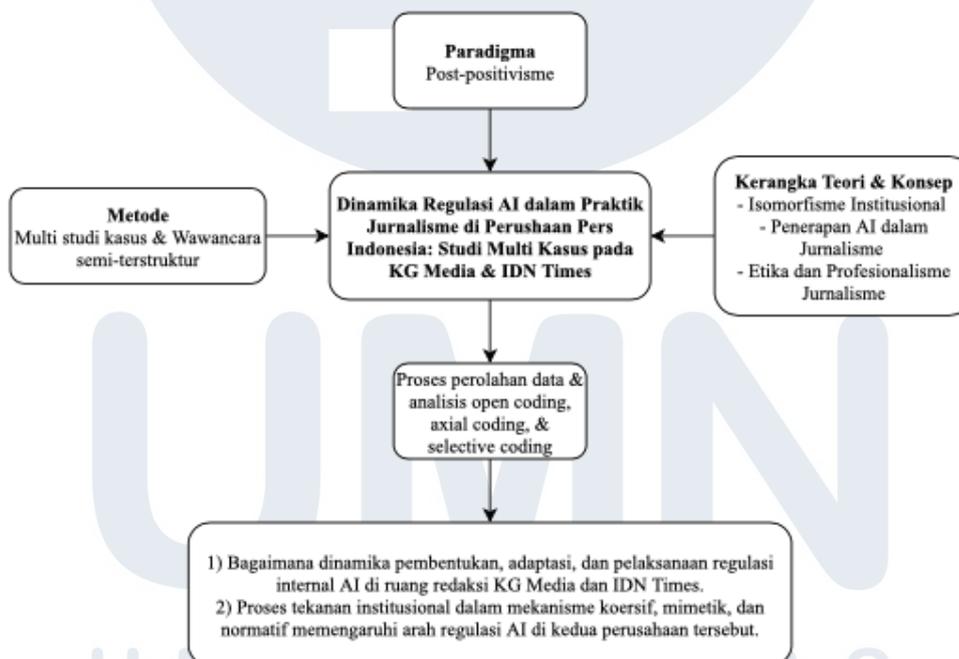
Di sisi lain, otomatisasi dalam jurnalisme AI memungkinkan jurnalis untuk lebih fokus pada tugas yang lebih kompleks seperti investigasi mendalam dan analisis yang kritis. Namun, otomatisasi AI harus tetap mematuhi nilai-nilai jurnalistik seperti independensi dan kepentingan publik. Oleh karena itu, otomatisasi AI harus tetap menjaga nilai-nilai jurnalisme agar kualitas berita tetap terjaga (Surya Mahendra et al., 2024, p, 208).

Terakhir, kredibilitas dalam jurnalisme AI yang menjadi faktor utama dalam mengonsumsi berita. Kredibilitas berita yang dihasilkan oleh

AI menjadi pertanyaan utama bagi publik. Oleh karena itu, penting untuk institusi media dalam mempertahankan standar profesionalisme dalam penggunaan AI, memastikan bahwa teknologi ini digunakan dengan cara yang memperkuat kredibilitas berita dan tidak melemahkan nilai-nilai jurnalisme (Biswal & Kulkarni, 2024, p. 174).

Dengan demikian, konsep etika dan profesionalisme jurnalisme ini memberikan panduan untuk peneliti dalam menghadapi tantangan teknologi AI dalam dunia jurnalistik. Dalam konteks penelitian ini, konsep etika dan profesionalisme jurnalisme dapat dijadikan acuan untuk melihat dinamika regulasi AI dalam jurnalistik di Indonesia.

2.3 Alur Penelitian



Gambar 2.1 Alur Penelitian